



Kementrian Dalam Negeri
Republik Indonesia

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

PRIORITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DATA DALAM SIPD

Disampaikan oleh:

Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan
Daerah
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri



www.kemendagri.go.id



[Kemendagri_RI](#)



[kemendagri](#)



[@kemendagri](#)



[@kemendagriRI](#)



PEMBANGUNAN DAERAH DAN TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH



PEMBANGUNAN DAERAH merupakan perwujudan dari **pelaksanaan Urusan Pemerintahan** yang telah diserahkan ke Daerah sebagai **bagian integral dari pembangunan nasional**
(UU 23/2014 PEMERINTAHAN DAERAH)

Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk **peningkatan dan pemerataan:**

1. Pendapatan masyarakat;
2. Kesempatan kerja;
3. Lapangan berusaha;
4. Akses dan kualitas pelayanan publik
5. Daya saing Daerah.





PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

ABSOLUT

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

KONKUREN

1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL

WAJIB (24)

PILIHAN (8)

PELAYANAN DASAR

NON PELAYANAN DASAR

S P M

N S P K

Sesuai Kewenangan, Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan

URUSAN WAJIB terkait Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat & kawasan pemukiman
5. Ketentraman, ketertiban & perlindungan Masyarakat
6. Sosial

URUSAN WAJIB tdk terkait Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan & perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi kependudukan & catatan sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat & Desa

berencana

9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, usaha kecil & menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan & Olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan dan
18. Kearsipan

URUSAN PILIHAN

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan
2. Keuangan
3. Kepegawaian
4. Pendidikan dan Pelatihan
5. Penelitian dan Pengembangan
6. Pengelolaan Perbatasan
7. Pengelolaan Penghubung
8. Pengendalian penduduk & keluarga

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan Administrasi
2. Kota Administrasi
3. Kabupaten Administrasi

Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur Kekhususan

1. Kekhususan Aceh
2. Kekhususan Papua
3. Kekhususan Papua Barat



ASTA CITA DARI PERSPEKTIF KEWENANGAN DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

2025-2029

8 Misi Asta Cita

17 Program Prioritas

KABINET MERAH PUTIH

**(PRO SN) PEMETAAN TEMATIK
PEMBANGUNAN
SESUAI KEWENANGAN DAERAH**

**KEMISKINAN EKSTREM, STUNTING,
MBG, INFLASI, PERSAMPAHAN,
GENDER, KOPERASI MERAH PUTIH,
SEKOLAH RAKYAT, DLL**

INTERVENSI

INTERVENSI

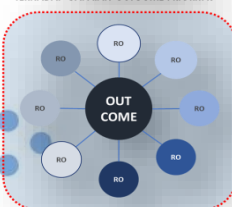


**MENTERI DALAM NEGERI
MELAKUKAN PEMBINAAN &
PENGAWASAN
RPJPD, RPJMD, RKPD, APBD & KINERJA
MELALUI SIPD
(PEDOMAN RPJPD, RPJMD, RKPD &
PEDOMAN APBD)**

**KEWENANGAN DAERAH
32 URUSAN KONKUREN, 412 PROGRAM,
1.778 KEGIATAN, 7.678 SUB KEGIATAN,
1.172 INDIKATOR OUTCOME, 8.373 DSSD**

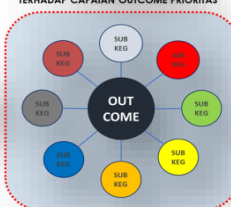
KONKURENSI PUSAT DAN DAERAH

PUSAT
DUKUNGAN RINCIAN OUTPUT (RO) KL
TERHADAP CAPAIAN OUTCOME PRIORITAS



OUTCOME PRIORITAS SEBAGAI TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

DAERAH
DUKUNGAN OUTPUT DAERAH (SUB KEGIATAN)
TERHADAP CAPAIAN OUTCOME PRIORITAS



**KINERJA DAN KERJA KEPALA DAERAH
DALAM MENDUKUNG ASTACITA
(KINERJA "PELAYANAN" MASYARAKAT & ASTACITA)**

OUTPUT

**INTERNALISASI
RAKORTEKRENBANG ke
RPJMD, RENSTRA, RKPD,
RENJA, APBD, RKA**

**MENTERI DALAM NEGERI
MELAKUKAN PEMBINAAN &
PENGAWASAN
RPJPD, RPJMD, RKPD, APBD &
KINERJA MELALUI SIPD
(PEDOMAN RPJPD, RPJMD, RKPD &
PEDOMAN APBD)**

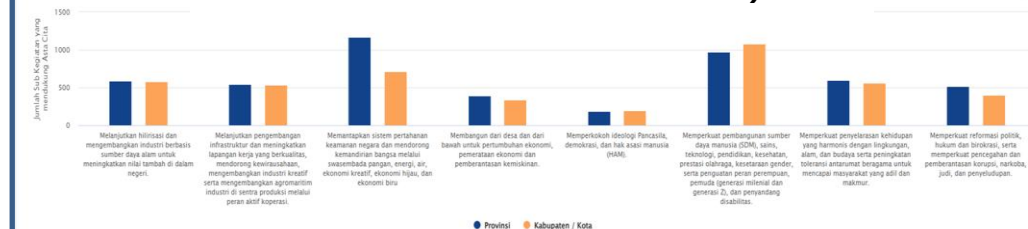


INTERVENSI

**PROGRAM MENDUKUNG
ASTACITA**



**SUB KEGIATAN MENDUKUNG ASTACITA (UTAMAKAN
"PELAYANAN" KEPADA MASYARAKAT)**



**DIBIYAI APBD, DAK, DAN SUMBER PEMBIAYAAN LAINNYA
SESUAI KEWENANGAN DAERAH DI PRIORITASKAN UNTUK
"PELAYANAN" KEPADA MASYARAKAT**



DUKUNGAN SUB KEGIATAN RENSTRA TERHADAP ASTA CITA

Dukungan Sub Kegiatan pada RENSTRA Rancangan Akhir yang mendukung Asta Cita

Informasi

- Data diambil pada tanggal Rabu, 10 September 2025 04:34:31.
- Data diupdate setiap 1 hari pada jam 04:00 WIB.

Perbarui Data

Provinsi

Pilih Pemerintah Daerah

Terapkan Filter

● Kategori tinggi (80 sd 100%) ● Kategori sedang (60 sd 79%) ● Kategori rendah (dibawah 60%)

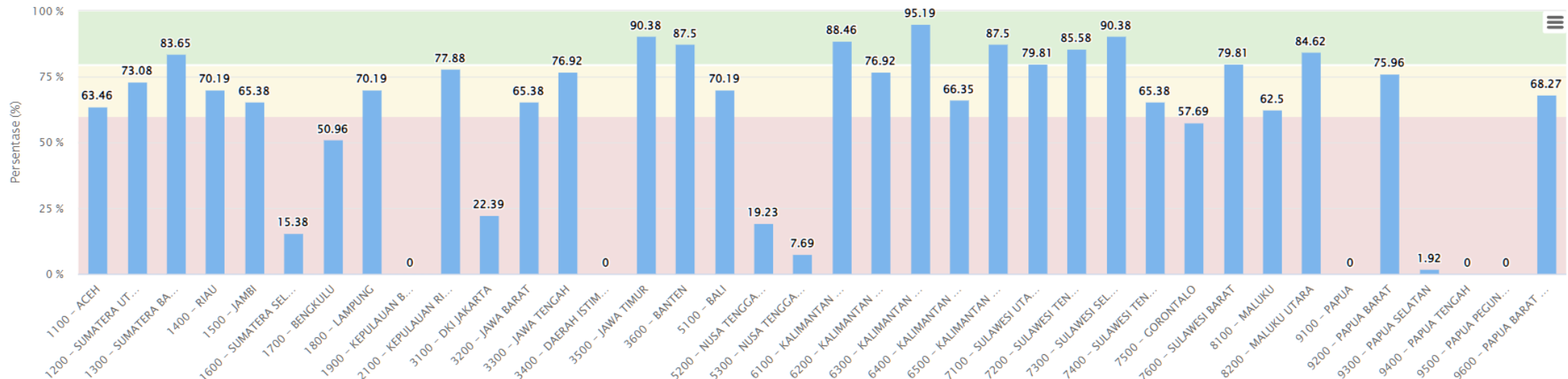
Print

PNG

JPEG

PDF

SVG





DUKUNGAN SUB KEGIATAN RENSTRA PROV, KAB,KOTA SE JATENG TERHADAP ASTA CITA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Dukungan Sub Kegiatan pada RENSTRA Rancangan Akhir yang mendukung Asta Cita

Informasi

- Data diambil pada tanggal Senin, 15 September 2025 22:11:38 .
- Data diupdate setiap 1 hari pada jam 04:00 WIB.

Perbarui Data

● Kategori tinggi (80 sd 100%) ● Kategori sedang (60 sd 79%) ● Kategori rendah (dibawah 60%)

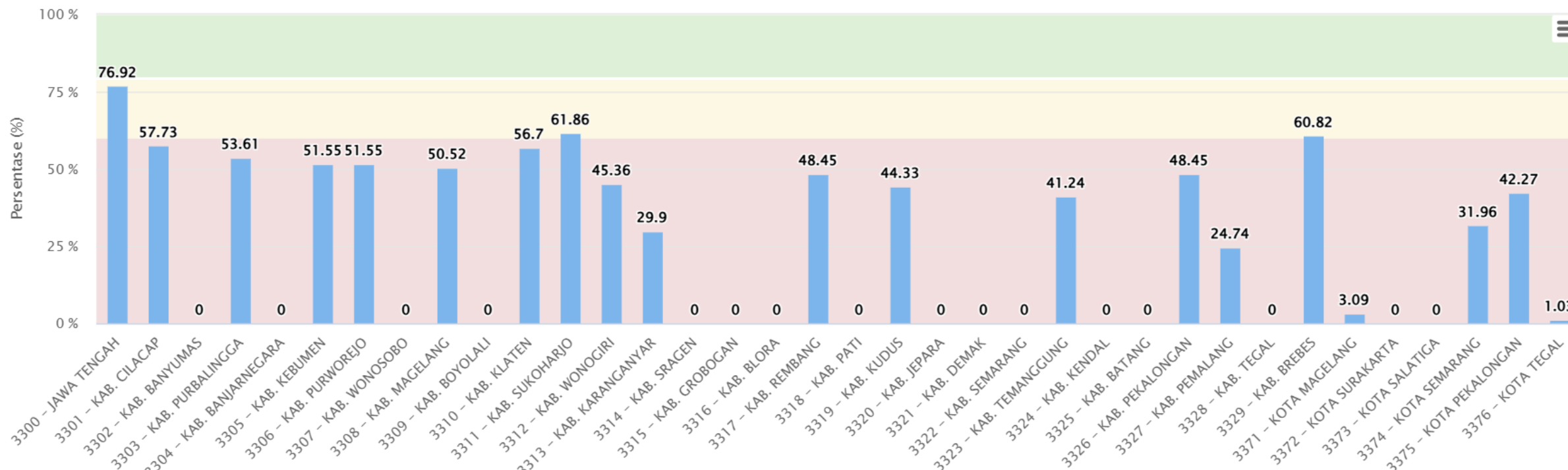
Print

PNG

JPEG

PDF

SVG





DUKUNGAN SUB KEGIATAN RKPD 2025 PROV, KAB,KOTA SE JATENG TERHADAP ASTA CITA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Dukungan Sub Kegiatan pada RKPD Murni Rancangan Akhir 2025 yang mendukung Asta Cita

Informasi

- Data diambil pada tanggal Senin, 15 September 2025 22:11:38 .
- Data diupdate setiap 1 hari pada jam 04:00 WIB.

Perbarui Data

● Kategori tinggi (80 sd 100%) ● Kategori sedang (60 sd 79%) ● Kategori rendah (dibawah 60%)

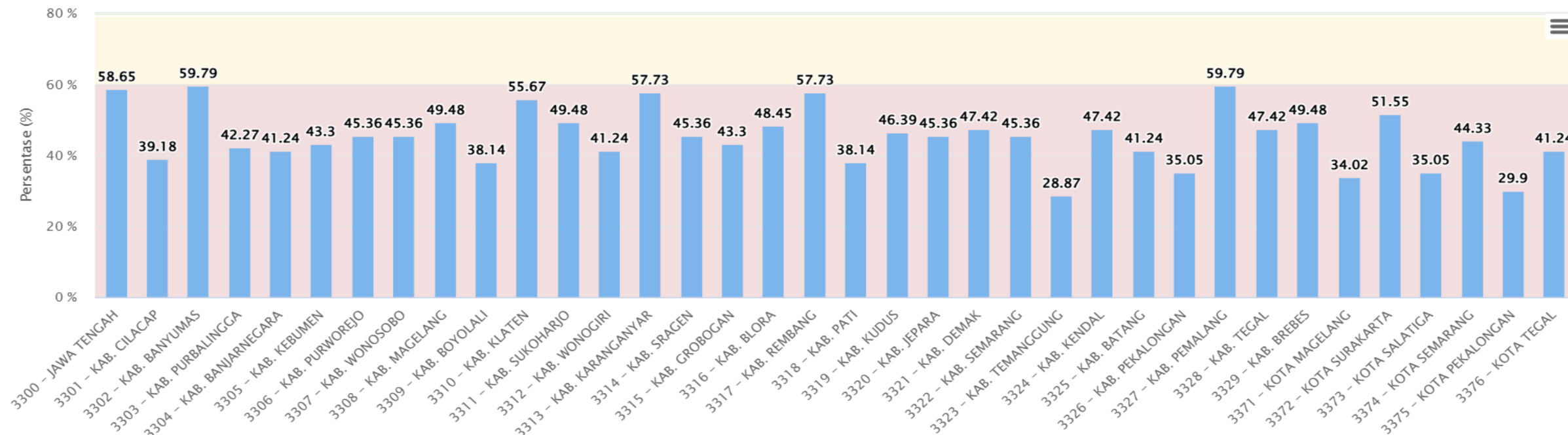
Print

PNG

JPEG

PDF

SVG





KEBIJAKAN KEMENDAGRI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL



1

Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 (Instruksi Menteri Dalam Negeri 2/2025)



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
DAN RENCANA STRATEGIS PERINGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029
MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota;
3. Ketua DPRD Provinsi; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.
- Untuk :
KESATU : Khusus kepada:
a. Gubernur bersama DPRD Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR A)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR P) untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 khusus bagi Provinsi di wilayah Papua; dan

2

Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui P-RKPD dan P-APBD Tahun 2025 (SE Mendagri 900.1.1/640/SJ)



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Februari 2025

- Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
3. Ketua DPRD Provinsi.
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 900.1.1/640/SJ

TENTANG

PENYESUAIAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum
a. Pasal 264 ayat (5) dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 161 ayat (1) dan Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; dan
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025.

3

Permendagri 10/2025 ttg Pedum RKPD 2026



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39



www.kemendagri.go.id



kemendagri_RI



kemendagri



@kemendagri



@kemendagriRI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

4 Surat Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Dokrenda dalam SIPD

26 Juni 2025

Nomor : 000.8.2.2/3556/Bangda
Sifat : Segera
Hal : Surat Pelaksanaan Fasilitasi Ranperkada RKPD Tahun 2026 dan Evaluasi
Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029

Yth. 1. Gubernur seluruh Indonesia
2. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Diktum Kesebelas pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan dalam rangka memperoleh masukan oleh Kementerian/Lembaga dengan mempertimbangkan kesesuaian kepentingan umum serta memastikan keselarasan perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan Fasilitasi Ranperkada RKPD Tahun 2026 dan Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 tingkat Provinsi oleh Kementerian Dalam Negeri dan tingkat Kabupaten/Kota oleh Provinsi.

Sehubungan hal tersebut, dalam rangka persiapan pelaksanaan Fasilitasi Ranperkada RKPD Tahun 2026 dan Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 berbasis SIPD, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota agar dapat melengkapi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Menyediakan data/informasi rencana tata ruang wilayah (Perda tata ruang dan peta rencana tata ruang).
- Substansi pelaksanaan fasilitasi antara lain; RPJMD, RKPD, hasil pelaksanaan Rakortekrenbang Tahun 2025, dan lain-lain yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025.
- Fasilitasi Ranperkada RKPD Tahun 2026:
 - Menyampaikan (*upload*) surat permohonan fasilitasi yang disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026;
 - Menyampaikan (*upload*) dokumen RKPD tahapan Rankhir;
 - Menyampaikan (*upload*) dokumen berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2026;
 - Menyampaikan (*upload*) dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
 - Menyampaikan (*upload*) dokumen gambaran konsistensi program antara rancangan atau rancangan akhir RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD;
 - Menyampaikan (*upload*) dokumen hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan
 - Menyampaikan (*upload*) dokumen daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2026.
- Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029:
 - Menyampaikan (*upload*) surat permohonan evaluasi yang disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025;

- Penyebutan/publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) minimal sampai dengan Tahun 2024; dan
- RPJMD dan Renstra seluruh perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah diinput dan diproses sampai tahapan Rankhir.

Pelaksanaan Fasilitasi Ranperkada RKPD Tahun 2026 dan Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 melalui SIPD dapat diakses pada tautan <https://sipd.kemendagri.go.id/> atau pelaksanaan fasilitasi diakses melalui <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/fasilitasi/> dan pelaksanaan evaluasi diakses melalui <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rpjmd/>.

Untuk mendukung pengisian E-Walidata, RPJMD dan Renstra dimaksud telah disediakan panduan, *manual book*, video tutorial, serta daftar narahubung pejabat yang dapat diakses pada menu *helpdesk* di dalam modul E-Walidata, RPJMD dan Renstra.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,



Restuardy Daud

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri;
- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- Kepala Badan Pusat Statistik;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
- Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas.



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



@kemendagri



@kemendagriRI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM SIPD

Pasal 274 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Pasal 144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Informasi
Pembangunan Daerah
(Dikelola BAPPEDA)

Informasi Keuangan
Daerah
(Dikelola BAKD)

Informasi Pemda
Lainnya

Data Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Informasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah

Analisis dan Profil
Pembangunan
Daerah



Proses e-walidata berisikan, proses ini **menjamin data dan informasi yang valid sesuai prinsip Satu Data Indonesia**

sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Pasal 8 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Informasi Hasil
Pembangunan Daerah

- **Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD** dimulai dari data perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan proses perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah
- **Data Perencanaan Pembangunan Daerah** adalah **proses** memuat e-Walidata, Data Perencanaan dan aplikasi pemutakhiran dalam menyediakan **database Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan** yang digunakan dalam penyusunan Dokrenda.
- **Proses perencanaan pembangunan daerah** yang komprehensif, memanfaatkan data dari eWalidata dan sinkronisasi data **menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah** yang berkualitas. (*Pasal 14 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019*)
- **Analisis dan profil** memberikan **gambaran kondisi pembangunan daerah, capaian target-target dan tujuan pembangunan daerah**, serta **proyeksi pembangunan daerah** ke depan.





DATA & INFORMASI SIPD JAWA TENGAH DALAM MENDUKUNG ASTA CITA DARI PERSPEKTIF KEWENANGAN DAERAH DALAM MELAYANI MASYARAKAT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Beranda

Hot-line CS +6281317633727

Email sipd@kemendagri.go.id

Selamat Datang di,



SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia

Pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.



Informasi Aplikasi

Pelajari cara kerja Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan mudah melalui beberapa video panduan berikut

Unduh

LAYANAN_



INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.



INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan Informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.



INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA

Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan Informasi lainnya.



DATA & INFORMASI PEMUTAKHIRAN SIPD KEWENANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG ASTA CITA 2026



Misi Astacita

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentr...

Bidang Prioritas

Pilih Bidang Prioritas

Program Prioritas

Pilih Program Prioritas

Kegiatan Prioritas Umum

Pilih Kegiatan Prioritas Umum

Jenis

☒ Semua ☐ Aktifitas ☐ Layanan

17 Program Prioritas Nasional

+

Tematik Pembangunan

+

Terapkan Filter

Tampilkan Semua Data

Shift Scroll untuk geser ke kanan

Kolom Tampil Download Excel

Menampilkan 50 data per halaman Pencarian: Pencarian Data

NO	JENIS PEMDA	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL
1	PROV	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.10.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi.	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	Berita Acara	Pemerintah Daerah melaksanakan Koordinasi serta fasilitasi pada pelaksanaan Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria di tingkat provinsi
2	PROV	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.10.06.1.01.0005 Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi dalam pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Berita Acara	Salah satu tugas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tingkat Provinsi adalah memfasilitasi penataan aset dalam rangka Reforma Agraria di tingkat provinsi. Terkait hal ini perlu dilaksanakan rapat-rapat koordinasi penataan aset dalam GTRA provinsi
3	PROV	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	Penyediaan perlengkapan jalan yang dimaksud adalah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung Rincian Perlengkapan Jalan Rambu peringatan: Rambu peringatan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalan lain



DATA & INFORMASI INDIKATOR OUTCOME PEMUTAKHIRAN SIPD SESUAI KEWENANGAN DAERAH



INDIKATOR OUTCOME



HALAMAN UTAMA

LOGIN

NOMENKLATUR SUBKEGIATAN

INDIKATOR OUTCOME

Filter Data

Kewenangan

☐ Provinsi ☐ Kabupaten Kota

Tujuan Pembangunan Daerah

Pilih Tujuan Pembangunan Daerah

Aspek Informasi Pembangunan Daerah

Pilih Aspek Informasi Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

Pilih Bidang Urusan

Tematik

Pilih Tematik

Satu Urusan / Lintas Urusan

☐ Satu Urusan ☐ Lintas Urusan

Terapkan Filter

Tampilkan Semua Data

Shift Scroll untuk geser ke kanan

Menampilkan 10 data per halaman

Pencarian:

Kode Indikator Outcome	Kode Referensi Nasional	Indikator Outcome	Satuan	Formulasi	Definisi Operasional	Peraturan	Kewenangan	Tujuan Pembangunan Daerah	Aspek Informasi Pembangunan Daerah	Satu Urusan / Lintas
000001	SDI-Bappenas 09.02.053	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp Juta)	Tampilkan	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun		PROVINSI KABKOTA	Pendapatan masyarakat	Kesejahteraan Masyarakat	Lintas Urusc
000002	SDI-Bappenas 09.05.002	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	Tampilkan	Indeks Ekonomi Biru Indonesia menghitung kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. Skor indeks akhir berkisar dari nol hingga seratus dan mengukur kondisi terkini ekonomi biru secara holistik. IBEI disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan sektor Ekonomi Biru. IBEI juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi ekonomi biru di masa depan, sesuai dengan asumsi-asumsi yang ditentukan		PROVINSI KABKOTA	Pendapatan masyarakat	Ekonomi dan Keuangan	Lintas Urusc
000003	SDI-Bappenas 02.01.023	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	Tampilkan	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.		PROVINSI KABKOTA	Pendapatan masyarakat	Ekonomi dan Keuangan	Lintas Urusc



PERANGKAT DAERAH BERBASIS URUSAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI KEWENANGAN (Basis Data Kependudukan)



VISUALISASI DATA KEPENDUDUKAN

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Home

Provinsi	Jumlah Kabupa...	Jumlah Kota	Jumlah Pendu...	Kepala Keluarga	Perpindahan Pe...	Meninggal	Perubahan Data	Wajib KTP
JAWA TIMUR	29	9	41,919,906	14,733,859	81,957	196,321	36,758,757	32,013,705
JAWA TENGAH	29	6	38,430,645	13,113,678	68,302	172,586	32,762,643	28,851,388
SUMATERA UTARA	25	8	15,640,905	4,736,863	76,489	46,737	13,202,417	11,140,889
BANTEN	4	4	12,881,374	4,120,486	49,009	26,704	11,199,014	9,150,028
DKI JAKARTA	1	5	11,038,216	3,617,684	38,444	47,440	10,434,938	8,115,838
SULAWESI SELATAN	21	3	9,528,276	3,048,967	39,071	29,027	8,483,094	6,843,057
LAMPUNG	13	2	9,144,263	2,951,313	28,042	19,432	7,422,345	6,577,372
SUMATERA SELATAN	13	4	9,064,690	2,820,573	35,748	24,182	7,302,527	6,432,793
RIAU	10	2	7,099,297	2,125,342	30,590	16,984	5,781,595	4,911,256





KETERSEDIAAN DATA PERDA RPJPD KAB/KOTA SE JAWA TENGAH DALAM SIPD

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**



sipd-ri.kemendagri.go.id/profil/dashboard-eksekutif?m=rpjpd&f=keterisian_perda

120%



DASHBOARD EKSEKUTIF



Dashboard

RPJPD

Arah Pembangunan

RPJMD

RKPD

EWALIDATA

Periode RPJPD

2025 - 2045

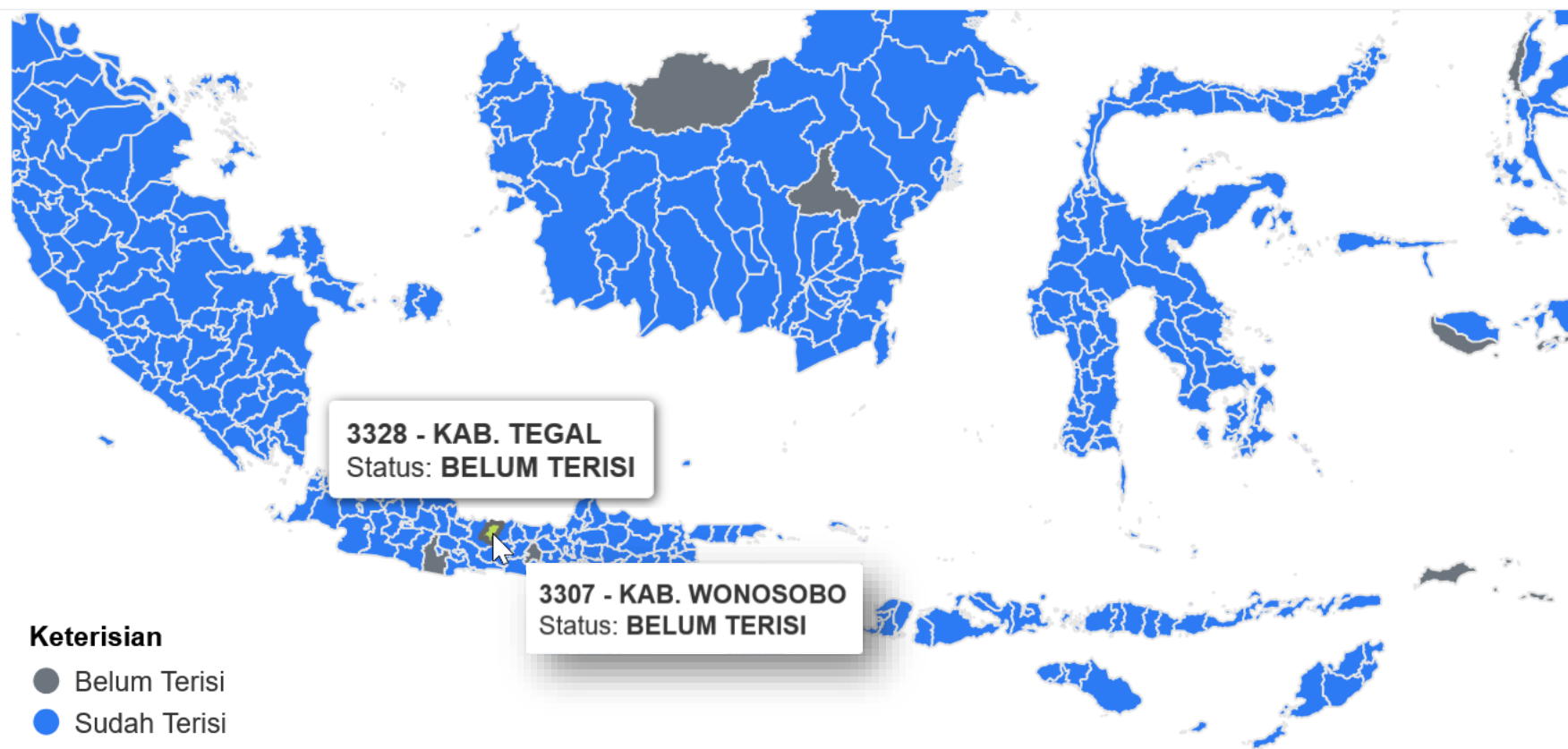
Tipe Pemda

PROVINSI

KABUPATEN / KOTA

DOWNLOAD EXCEL

i Klik pada peta
untuk mengunduh
file.





KETERSEDIAAN DATA RPJMD KAB/KOTA SE JAWA TENGAH DALAM SIPD



sipd-ri.kemendagri.go.id/profil/dashboard-eksekutif?m=rpjmd&f=map

120%



DASHBOARD EKSEKUTIF

Dashboard

RPJPD

Arah Pembangunan

RPJMD

RKPD

EWALIDATA

Periode rpjmd

2025 - 2029

Tipe Pemda

PROVINSI

KABUPATEN / KOTA

Tahapan

- Final
- Rancangan Akhir
- Musrenbang
- Rancangan
- Rancangan Awal
- Persiapan
- Belum Input

3328 - KAB. TEGAL
Tahapan: TAHAPAN PERSIAPAN

3307 - KAB. WONOSOBO
Tahapan: TAHAPAN PERSIAPAN

3314 - KAB. SRAGEN
Tahapan: TAHAPAN PERSIAPAN



PERAN & PROSES DALAM eWALIDATA SIPD

← → ↺ sipd-ri.kemendagri.go.id/ewalidata/358dac3f30123714ee4c7cc907ac48db2b071e1b/?m=daerah_dashboard

Guest

Dashboard

Dashboard

API (interoperabilitas SDI)

PERENCANAAN

1 Januari 2024 s/d 29 Februari 2024

BAPPEDA

5.01.02.1.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

PENGUMPULAN DATA

30 Januari 2024 s/d 31 Desember 2025

Seluruh Perangkat Daerah
X.XX.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
X.XX.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

PEMERIKSAAN DATA

4 Maret 2024 s/d 31 Maret 2024

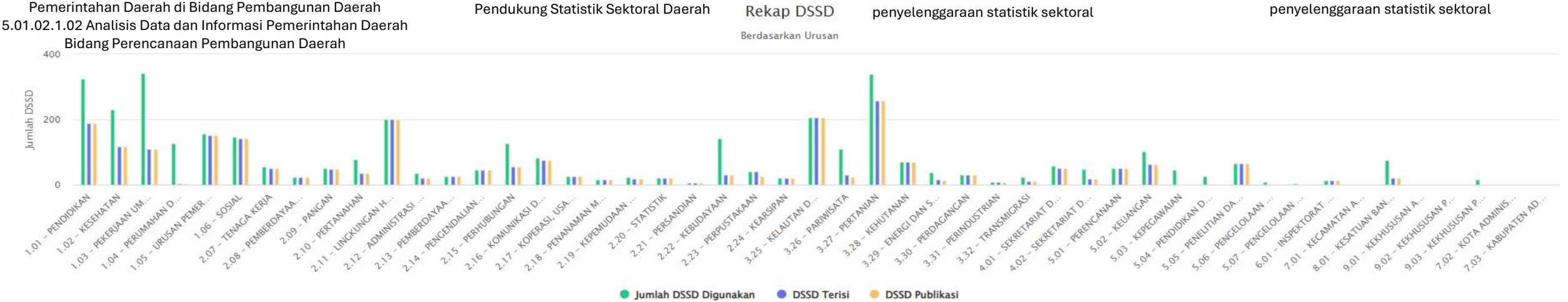
Walidata
2.20.02.1.01.0019 Peningkatan kualitas statistik sektoral
2.20.02.1.01.0021 Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral

API (interoperabilitas SDI)

PENYEBARLUASAN DATA

1 April 2024 s/d 31 Desember 2024

Walidata
2.20.02.1.01.0019 Peningkatan kualitas statistik sektoral
2.20.02.1.01.0021 Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral





KETERSEDIAAN PUBLIKASI DATA SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025 KAB/KOTA SE JAWA TENGAH DALAM SIPD

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



🔒 sipd-ri.kemendagri.go.id/profil/dashboard-eksekutif/4182cf807cb8ced8bbd69ea26e5ddd698f768f38/?m=m



DASHBOARD EKSEKUTIF

Dashboard

RPJPD

Arah Pembangunan

RPJMD

RKPD

EWALIDATA

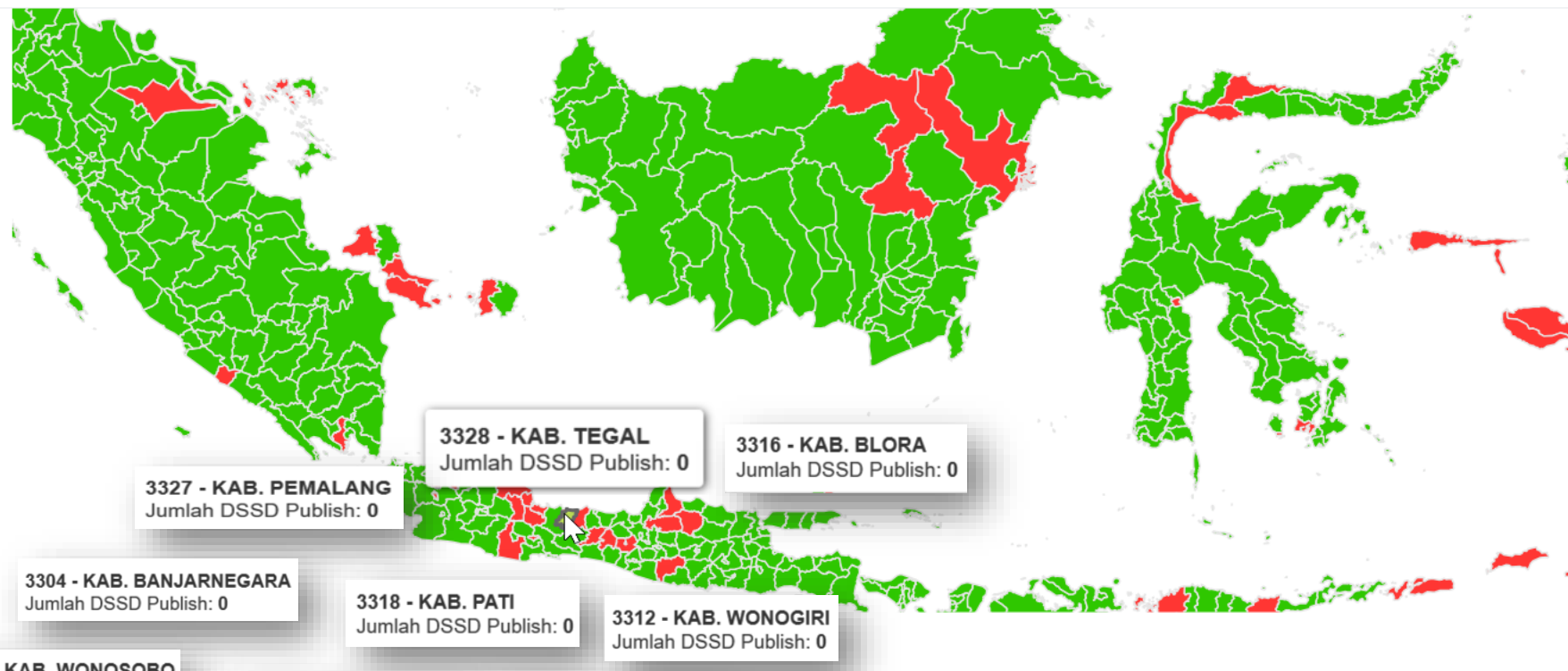
Tahun

2024

Tipe Pemda

PROVINSI

KABUPATEN / KOTA





DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI) TERHADAP ASTA CITA

1.

ASTA CITA

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

6 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	3 PROGRAM TANTRIBUMLINMAS
1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi 2. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 3. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan 4. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5. Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 6. Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	1. program penanggulangan bencana 2. program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum 3. program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

8 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 2. Pelayanan Informasi Publik 3. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 4. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 5. Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi 6. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas 7. Penyediaan Akses Internet 8. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	1. program pengelolaan informasi dan komunikasi publik 2. program pengelolaan aplikasi informatika

PROGRAM
SUB KEG
PRIORITAS
PROVINSI
2026

Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026 (Indikator yang sudah ada kode referensi SDI dalam SIPD)

1. **Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:** Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar
2. **Komunikasi dan Informatika:** Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah
3. **Kesatuan bangsa dan politik:** Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila

2 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1. program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik 2. program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan



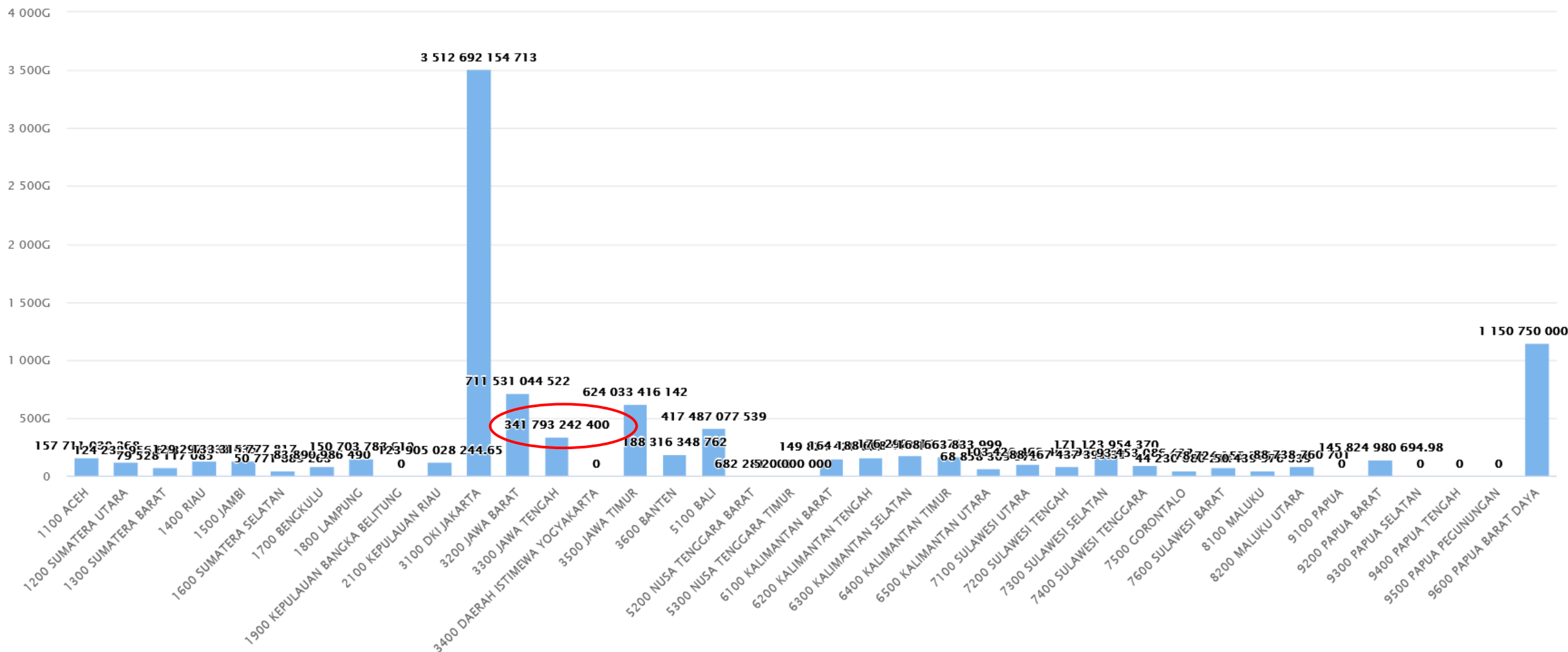
DUKUNGAN PAGU INDIKATIF PELAYANAN PUBLIK ASTACITA 1 SELURUH RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DALAM SIPD

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Pagu Subkegiatan pada RENSTRA Rancangan Akhir yang mendukung Asta Cita

Pagu Subkegiatan pada RENSTRA Rancangan Akhir yang mendukung Asta Cita



● Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).



DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI) TERHADAP ASTA CITA

2.

ASTA CITA

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

6 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	3 PROGRAM PUPR
1. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 4. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 5. Penetapan RTRW Provinsi 6. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMKM	1. program pengelolaan sumber daya air (sda) 2. program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 3. program penyelenggaraan penataan ruang

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM PANGAN
1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi 3. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1. program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 2. program penanganan kerawanan pangan

6 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM PERTANIAN
1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 3. Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 4. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 6. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	1. program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 2. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

9 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM KELAUTAN PERIKANAN
1. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 2. Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir 3. Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam 4. Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi 5. Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi 6. Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi 7. Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi 8. Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi 9. Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	1. program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil 2. program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

PROGRAM SUB KEG PRIORITAS PROVINSI 2026

Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026 (Indikator yang sudah ada kode referensi SDI dalam SIPD)

1. **PUPR:** (1) meningkatnya ketahanan diri untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air. (2) Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang
2. **Pangan:** Meningkatnya ketahanan pangan
3. **Pertanian:** Meningkatnya Produksi Pertanian
4. **Lingkungan Hidup:** Lingkungan Hidup Berkualitas
5. **Persandian:** Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemda
6. **Kelautan dan Perikanan:** Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
7. **Kehutanan:** Meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi
8. **ESDM:** Pencapaian Ketahanan Energi

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP
1. Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan 2. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3. Pengelolaan sampah Regional 4. Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. program pengelolaan persampahan

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM ESDM
1. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 2. Pelaksanaan kegiatan konservasi energi 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 4. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. program pengelolaan energi baru terbarukan 2. program pengelolaan ketenagalistrikan

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM KEHUTANAN
1. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 2. Fasilitas BPBHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar 3. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 4. Penyiapan Perhutanan Sosial	1. program pengelolaan hutan 2. program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan

2 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	1 PROGRAM PERSANDIAN
1. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 2. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

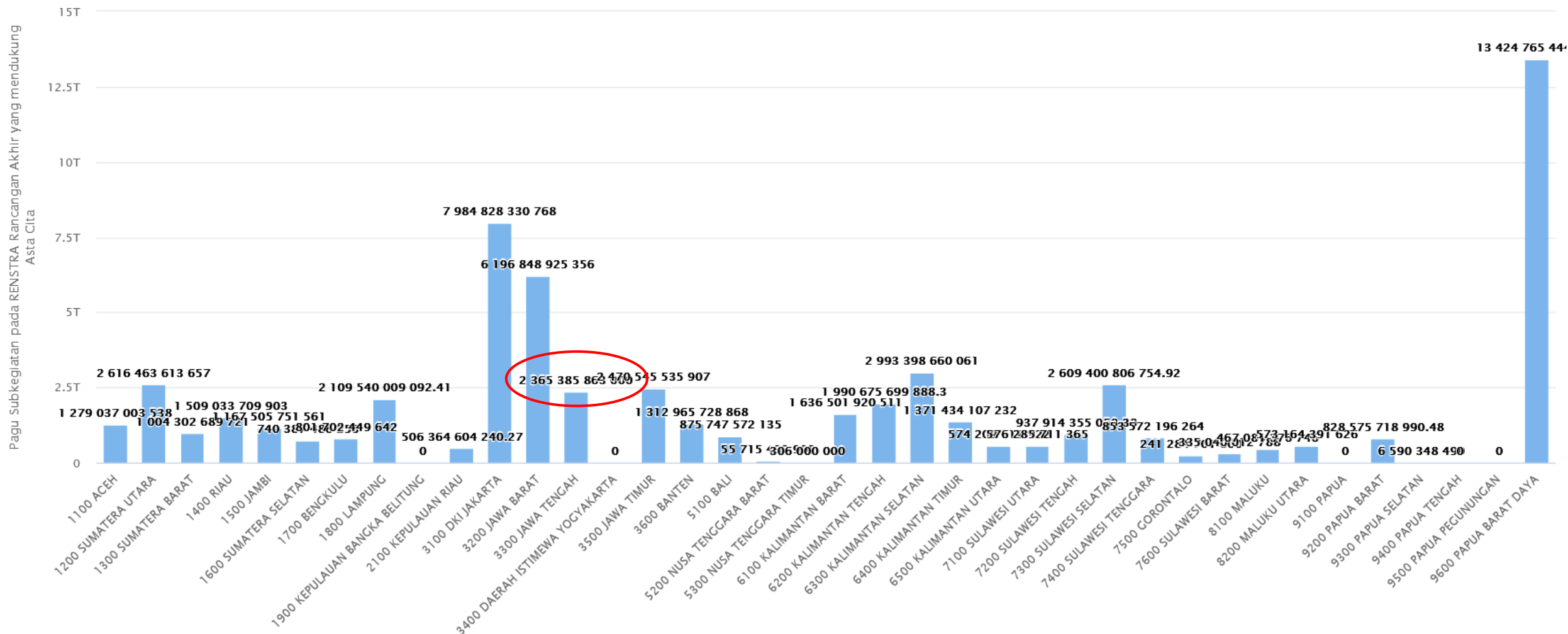


DUKUNGAN PAGU INDIKATIF PELAYANAN PUBLIK ASTACITA 2 SELURUH RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DALAM SIPD

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Pagu Subkegiatan pada RENSTRA Rancangan Akhir yang mendukung Asta Cita



● Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru



DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI) TERHADAP ASTA CITA

3.

ASTA CITA

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

2 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria

1 PROGRAM PERTANAHAN

program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2 PROGRAM PERHUBUNGAN

1. program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
2. program pengelolaan pelayanan

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI

1. Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
2. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3. Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
4. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

2 PROGRAM KOPERASI & UKM

1. program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
2. program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)

PROGRAM
SUB KEG
PRIORITAS
PROVINSI
2026

Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026

1. **Pertanahan:** Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah
2. **Perhubungan:** Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi
3. **Koperasi dan UKM:** Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM
4. **Kebudayaan:** Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)
5. **Pariwisata:** Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

5 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI

1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
2. Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
3. Penetapan Cagar Budaya
4. Pengembangan Cagar Budaya
5. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya

2 PROGRAM KEBUDAYAAN

1. program pengembangan kebudayaan
2. program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

12 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI

1. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
2. Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
3. Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi
4. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
5. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
6. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
8. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
9. Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
10. Fasilitasi Kekayaan Intelektual
11. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
12. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah

2 PROGRAM PARIWISATA

1. program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
2. program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual

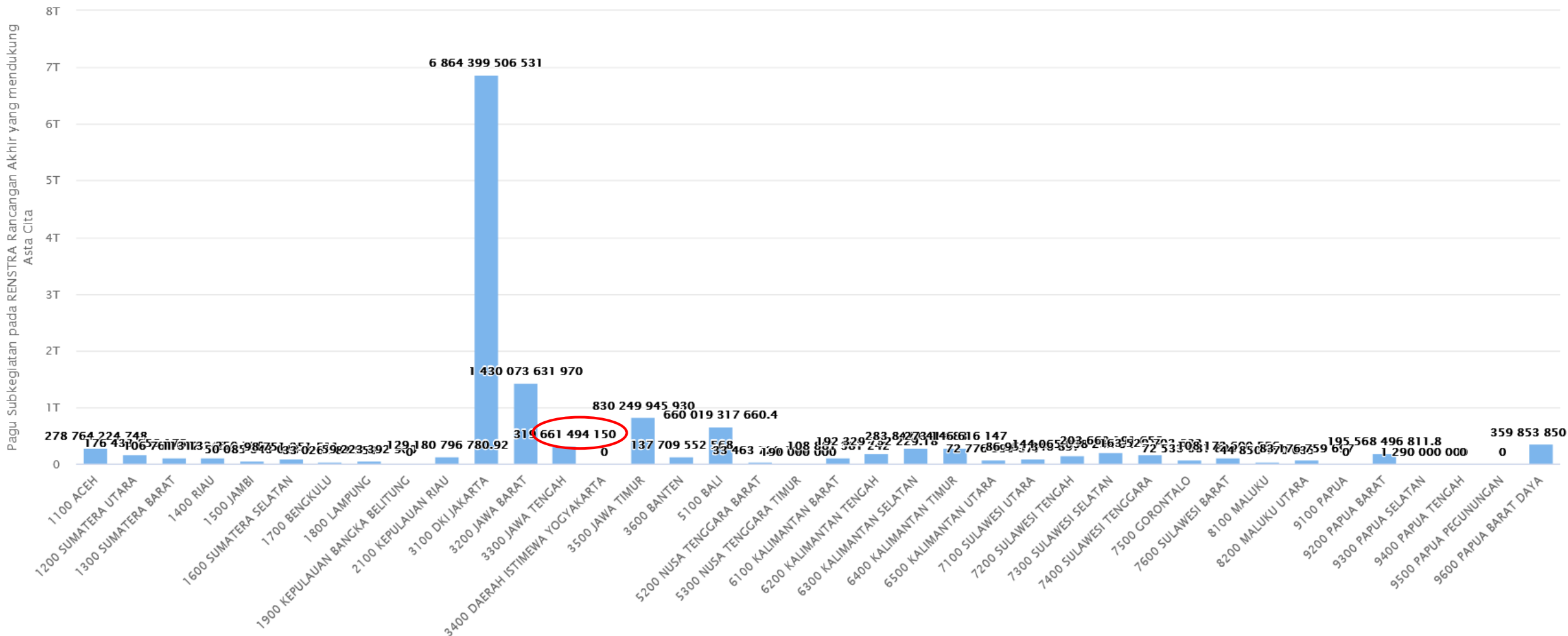


DUKUNGAN PAGU INDIKATIF PELAYANAN PUBLIK ASTACITA 3 SELURUH RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DALAM SIPD

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Pagu Subkegiatan pada RENSTRA Rancangan Akhir yang mendukung Asta Cita



● Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran...



DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI) TERHADAP ASTA CITA

4.

ASTA CITA

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

6 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI

1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Pendidikan
3. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Pendidikan
4. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
5. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
6. Pembangunan Ruang Kelas Baru

1 PROGRAM PENDIDIKAN

Program pengelolaan Pendidikan

6 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI

1. Pengembangan Rumah Sakit
2. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
5. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
6. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

2 PROGRAM KESEHATAN

1. program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat
2. program peningkatan kapasitas SDM kesehatan

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi
3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
4. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

2 PROGRAM SOSIAL

1. program pemberdayaan sosial
2. program perlindungan dan jaminan sosial

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
2. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
4. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

2 PROGRAM TENAGA KERJA

1. program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
2. program hubungan industrial

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI

1. Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
2. peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
3. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
4. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

2 PROGRAM PEMBERDAYAAN PPA

1. program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
2. program perlindungan khusus anak

PROGRAM SUB KEG PRIORITYAS PROVINSI 2026

Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026 (Indikator yang sudah ada kode referensi SDI dalam SIPD)

1. **Pendidikan:** Terpenuhinya Kebutuhan Dasar SPM Bidang Pendidikan
2. **Kesehatan:** Kesehatan Untuk Semua
3. **Sosial:** Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi
4. **Tenaga kerja:** Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja
5. **Pemberdayaan PPA:** Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak
6. **Adminkuk:** Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital
7. **PPKB:** Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)
8. **Pora:** Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga
9. **Perpustakaan:** Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI

1. Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
2. Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
3. Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
4. Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi

2 PROGRAM ADMINDUK

1. program pendaftaran penduduk
2. program pencatatan sipil

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
2. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
4. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

2 PROGRAM PPKB

1. program pembinaan keluarga berencana (kb)
2. program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda
3. Seleksi Atlet Daerah
4. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi

2 PROGRAM KEPEMUDAAN DAN OR

1. program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
2. program pengembangan daya saing keolahragaan

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI

1. Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
2. Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi
3. Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
4. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

2 PROGRAM PERPUSTAKAAN

1. program pembinaan perpustakaan
2. program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno

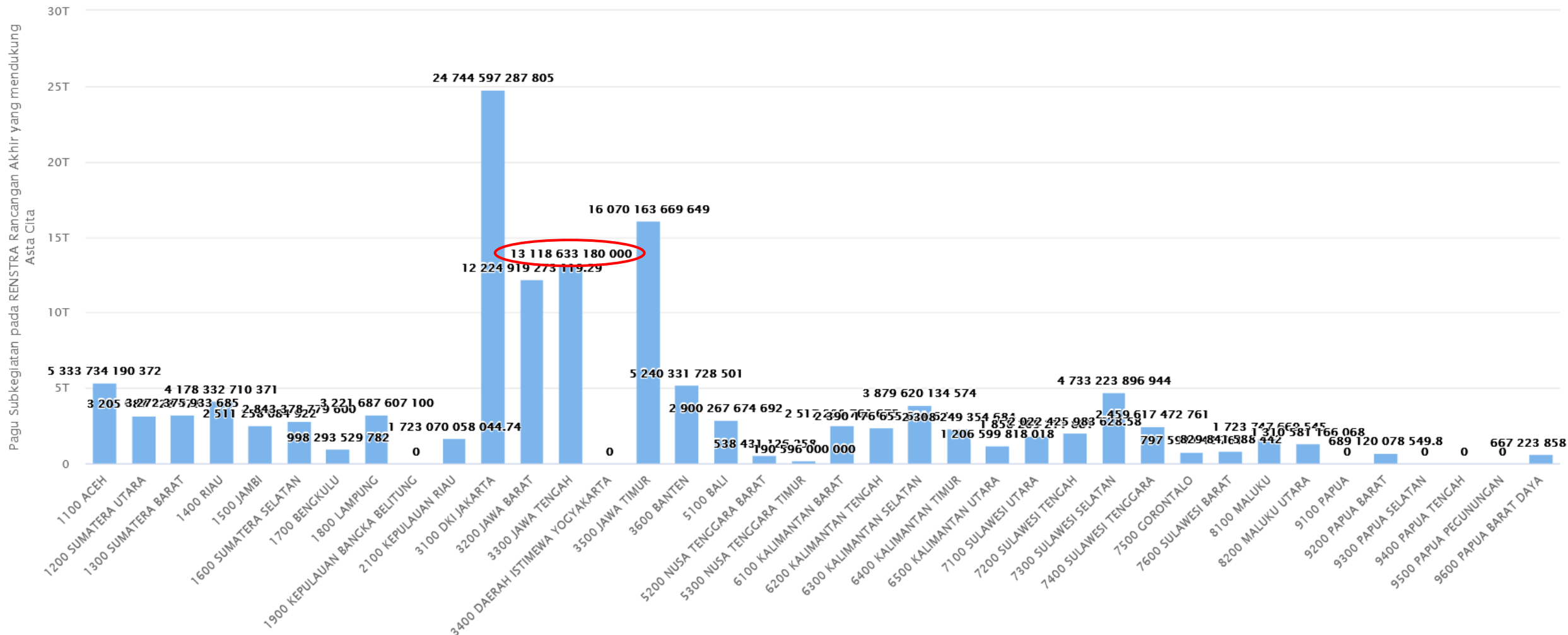


DUKUNGAN PAGU INDIKATIF PELAYANAN PUBLIK ASTACITA 4 SELURUH RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DALAM SIPD

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Pagu Subkegiatan pada RENSTRA Rancangan Akhir yang mendukung Asta Cita



● Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang ...



DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI) TERHADAP ASTA CITA

5.

ASTA CITA

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	3 PROGRAM PUPR
1. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 4. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 5. Penetapan RTRW Provinsi 6. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMKM	1. program pengelolaan sumber daya air (sda) 2. program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 3. program penyelenggaraan penataan ruang

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM PERHUBUNGAN
1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) 3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 4. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) 2. program pengelolaan pelayaran

2 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	1 PROGRAM PENANAMAN MODAL
1. Pengawasan Penanaman Modal 2. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	1. program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026 (Indikator yang sudah ada kode referensi SDI dalam SIPD)

1. **PUPR: (1)** Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air. **(2)** Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang
2. **Perhubungan:** Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi
3. **Penanaman Modal:** Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal
4. **Perdagangan:** Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global
5. **Perindustrian:** Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas

PROGRAM SUB KEG PRIORITAS PROVINSI 2026

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM PERDAGANGAN
1. Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 2. Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas 3. Pameran Dagang Internasional/Nasional 4. Peningkatan Citra Produk Ekspor	1. program peningkatan sarana distribusi perdagangan 2. program pengembangan ekspor

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM PERINDUSTRIAN
1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi 4. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	1. program perencanaan dan pembangunan industri 2. program pengendalian izin usaha industri

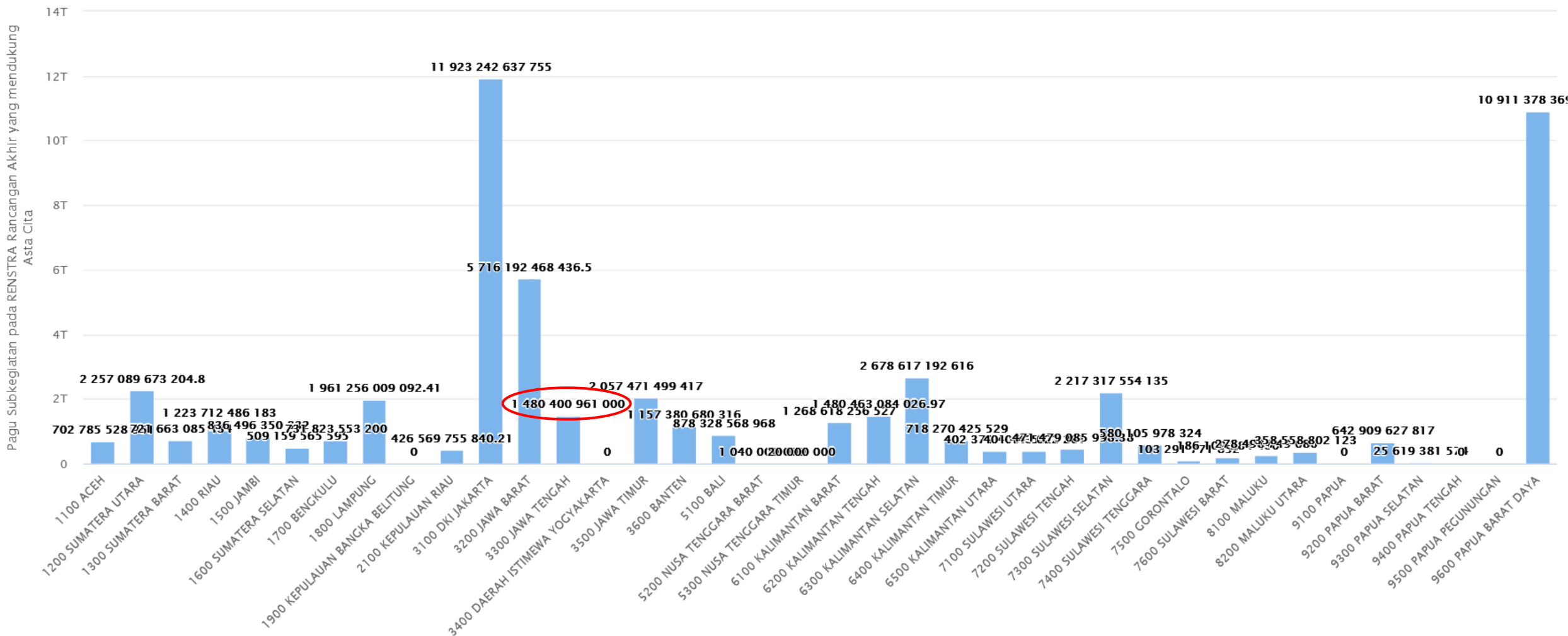


DUKUNGAN PAGU INDIKATIF ASTACITA 5 SELURUH RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DALAM SIPD

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Pagu Subkegiatan pada RENSTRA Rancangan Akhir yang mendukung Asta Cita



● Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.



DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI) TERHADAP ASTA CITA

6.

ASTA CITA

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM PERKIM
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	- Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM SOSIAL
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	- program pemberdayaan sosial - program perlindungan dan jaminan sosial
4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM TENAGA KERJA
- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	- program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja - program hubungan industrial

PROGRAM
SUB KEG
PRIORITAS
PROVINSI
2026

Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026 (Indikator yang sudah ada kode referensi SDI dalam SIPD)

- Perkim:** Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan
- Sosial:** Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi
- Tenaga Kerja:** Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja
- Pemberdayaan Masy & Desa:** Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa
- Transmigrasi:** Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi

2 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASY & DESA
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	- program penataan desa - program administrasi pemerintahan desa
3 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM TRANSMIGRASI
- Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota - Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi - Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	- program pembangunan kawasan transmigrasi - program pengembangan kawasan transmigrasi

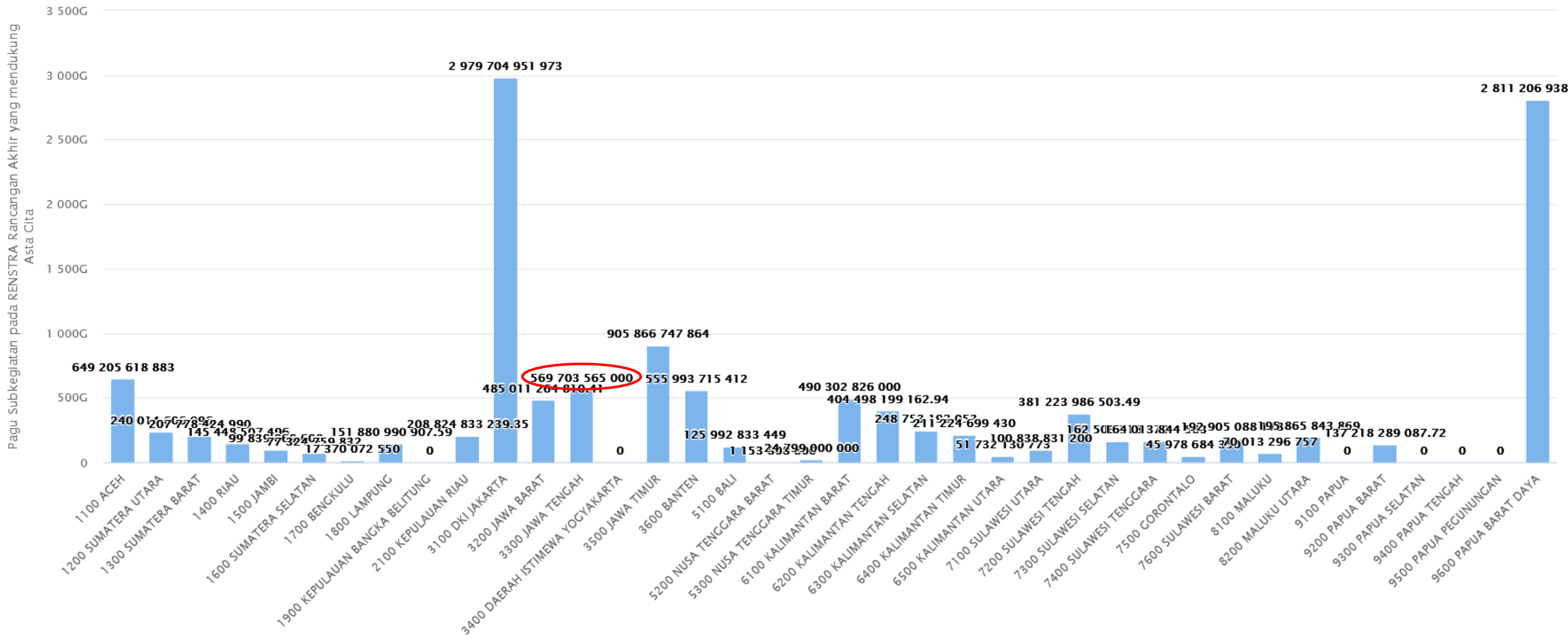


DUKUNGAN PAGU INDIKATIF PELAYANAN PUBLIK ASTACITA 6 SELURUH RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DALAM SIPD

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Pagu Subkegiatan pada RENSTRA Rancangan Akhir yang mendukung Asta Cita



● Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.



DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI) TERHADAP ASTA CITA

7.

ASTA CITA

Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.

2 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	1 PROGRAM STATISTIK
1. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia 2. Peningkatan kualitas statistik sektoral	program penyelenggaraan statistik sektoral

2 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	1 PROGRAM PERSANDIAN
1. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 2. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

8 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 2. Pelayanan Informasi Publik 3. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 4. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 5. Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi 6. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas 7. Penyediaan Akses Internet 8. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	1. program pengelolaan informasi dan komunikasi publik 2. program pengelolaan aplikasi informatika

PROGRAM
SUB KEG
PRIORITAS
PROVINSI
2026

Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026 (Indikator yang sudah ada kode referensi SDI dalam SIPD)

1. **Statistik:** Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
2. **Persandian:** Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah
3. **Komunikasi dan Informatika:** Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah
4. **Kesatuan bangsa dan politik:** Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila

2 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1. program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik 2. program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

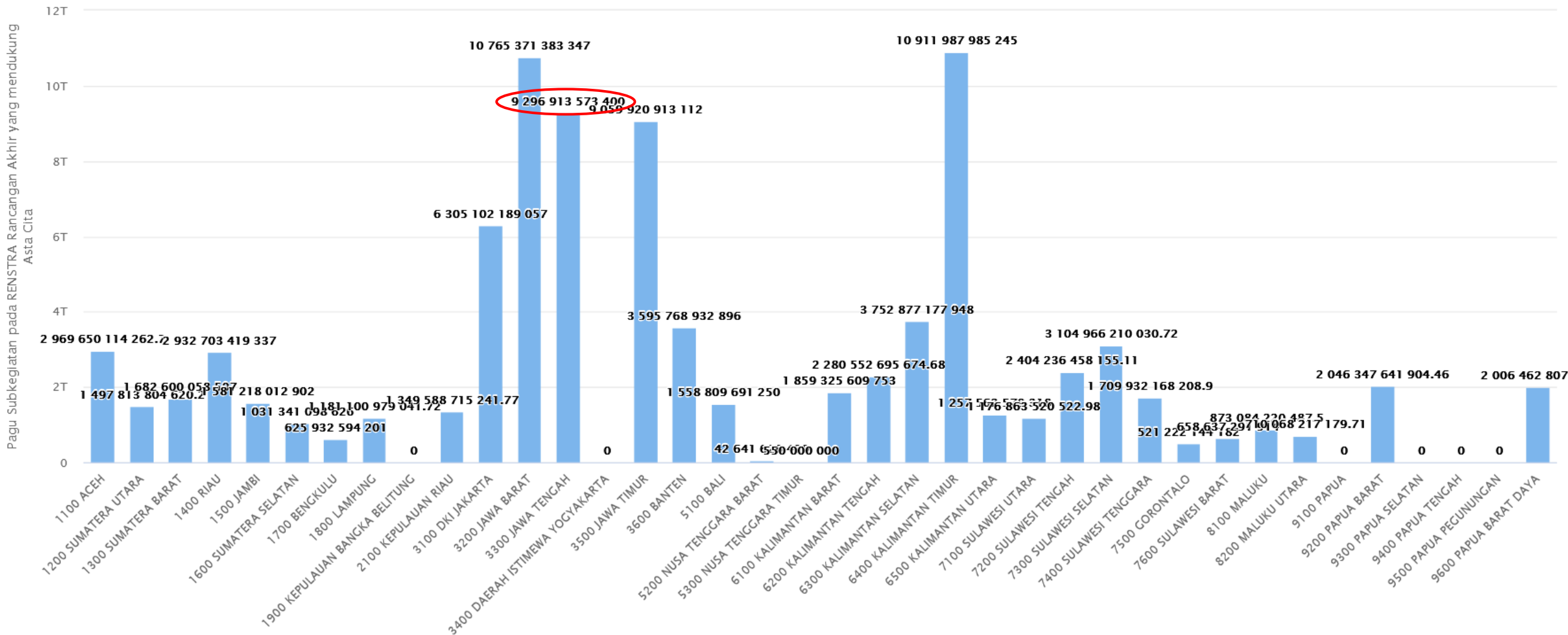


DUKUNGAN PAGU INDIKATIF PELAYANAN PUBLIK ASTACITA 7 SELURUH RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DALAM SIPD

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Pagu Subkegiatan pada RENSTRA Rancangan Akhir yang mendukung Asta Cita



● Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.



DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI) TERHADAP ASTA CITA

8.

ASTA CITA

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

6 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	3 PROGRAM TANTRIBUMLINMAS
1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi 2. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 3. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan 4. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5. Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 6. Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	1. program penanggulangan bencana 2. program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum 3. program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
2 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1. program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik 2. program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
5 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM KEBUDAYAAN
1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 2. Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 3. Penetapan Cagar Budaya 4. Pengembangan Cagar Budaya 5. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	1. program pengembangan kebudayaan 2. program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

PROGRAM SUB KEG PRIORITYAS PROVINSI 2026

Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026 (Indikator yang sudah ada kode referensi SDI dalam SIPD)

1. **Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:** Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar
2. **Lingkungan Hidup:** Lingkungan Hidup Berkualitas
3. **Pemberdayaan Masy & Desa:** Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa
4. **Kebudayaan:** Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)
5. **Perpustakaan:** Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat
6. **Kearsipan:** Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa
7. **Kesatuan bangsa dan politik:** Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila

4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP
1. Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan 2. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3. Pengelolaan sampah Regional 4. Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. program pengelolaan persampahan
2 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASY & DESA
1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. program penataan desa 2. program administrasi pemerintahan desa
4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	2 PROGRAM PERPUSTAKAAN
1. Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat 2. Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi 3. Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 4. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	1. program pembinaan perpustakaan 2. program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
2 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI	1 PROGRAM KEARSIPAN
1. Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi 2. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1. program pengelolaan arsip

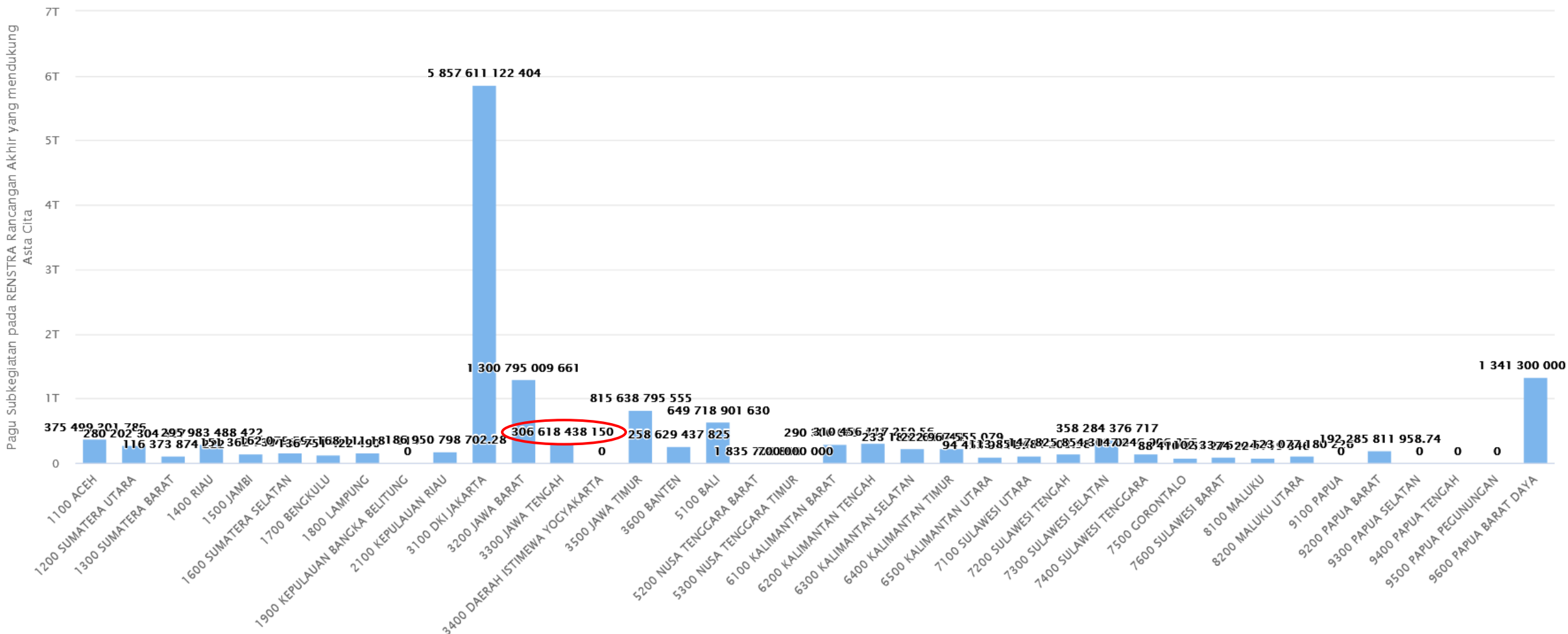


DUKUNGAN PAGU INDIKATIF PELAYANAN PUBLIK ASTACITA 8 SELURUH RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DALAM SIPD

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Pagu Subkegiatan pada RENSTRA Rancangan Akhir yang mendukung Asta Cita



● Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



DATA & INFORMASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 & 2026 DALAM MENDUKUNG ASTA CITA KAB/KOTA SE JAWA TENGAH DALAM SIPD

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Penyandingan Pagu Sub Kegiatan pada RKPD 2025 RENSTRA 2026

Informasi

- Data diambil pada tanggal Senin, 15 September 2025 22:11:38 .
- Data diupdate setiap 1 hari pada jam 04:00 WIB.

Perbarui Data

Filter Data Terlebih Dahulu Untuk Menampilkan Pagu Sub Kegiatan pada RKPD 2025 RENSTRA 2025!

Jenis Pemda

Provinsi

Pemerintah Daerah

Asta Cita

* Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

* Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

* Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

* Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

* Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

* Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

* Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

* Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.

Jenis

☒ Semua ☐ Aktifitas ☐ Layanan

Tematik

Pilih Tematik

Bidang / Urusan

Pilih Bidang Urusan

Program

Pilih Program

Kegiatan

Pilih Kegiatan

Sub Kegiatan

Pilih Sub Kegiatan

☒ 2025 ☒ 2026



DATA & INFORMASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 & 2026 DALAM MENDUKUNG ASTA CITA KAB KUDUS DALAM SIPD

No	Pemda	Bidang Urusan	Sub Kegiatan	Jenis	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Pagu 2025	Pagu 2026	Target 2025	Target 2026	Keterangan
1	3319 - KAB. KUDUS	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Aktifitas	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	...	6.224.717.000,00	2.746.401.500,00	2	0,5	
2	3319 - KAB. KUDUS	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Layanan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan mencakup Pembangunan dan Penambahan Jaringan Perpipaan (Unit Distribusi dan Pelayanan)	687.500.000,00	0,00	10	0	
3	3319 - KAB. KUDUS	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Aktifitas	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	...	0,00	0,00	0,5	0	
4	3319 - KAB. KUDUS	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Layanan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan mencakup: 1. Pembangunan Intake dan Jaringan 2. Pembangunan	0,00	0,00	1,5	0	



DATA SEKTORAL DAERAH DALAM SUB KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAHTAHUN 2025 & 2026 DALAM Mendukung ASTA CITA KAB KUDUS DALAM SIPD

Bidang / Urusan: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program: Pilih Program

Kegiatan: Pilih Kegiatan

Sub Kegiatan: Pilih Sub Kegiatan

☒ 2025 ☒ 2026

Terapkan Filter

INFORMASI Klik pada subkegiatan untuk menampilkan data DSSD.

Pencarian:

No	Pemda	Bidang Urusan	Sub Kegiatan
1	3319 - KAB. KUDUS	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
2	3319 - KAB. KUDUS	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
3	3319 - KAB. KUDUS	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
4	3319 - KAB. KUDUS	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Detail Sub Kegiatan

Informasi

- Data diambil pada tanggal Senin, 15 September 2025 22:11:38.
- Data diupdate setiap 1 hari pada jam 04:00 WIB.

Pemda

3319 - KAB. KUDUS

Bidang Urusan

1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Kegiatan

1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

INFORMASI Data yang ditampilkan adalah data yang sudah tersebarluaskan di aplikasi e-Walidata.

Pencarian:

Q Cari

Menampilkan 10 data per halaman

No	Bidang Urusan	DSSD	Data 2024	Data 2025	Data 2026
1	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sambungan Rumah	0	-	-
2	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum	11069	-	-

Total data sebanyak 2, menampilkan range data dari (1 - 2)

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Tutup

Pagu 2026	Target 2025	Target 2026	Keterangan
2.746.401.500,00	2	0,5	
0,00	10	0	
0,00	0,5	0	
0,00	1,5	0	



REKAP DATA SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024 DALAM DALAM SIPD



sipd-ri.kemendagri.go.id/profil/dashboard-eksekutif?m=ewalidata_rekap_nasional

DASHBOARD EKSEKUTIF

Dashboard RPJPD Arah Pembangunan RPJMD RKPD EWALIDATA

Tahun	No	kodeindikator	Urai	Satuan	Total	Total Provinsi	Total Kabkota	List Provinsi	List Kabkota
2024	1	1.02.000169	Ruang Bank Darah Rumah Sakit	Unit	2.702	132	2.570	1500 - JAMBI 9300 - PAPUA SELATAN 7400 - SULAWESI TENGGARA 3400 - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 9400 - PAPUA TENGAH +20 More	1377 - KOTA PARIAMAN 1209 - KAB. ASAHAN 3301 - KAB. CILACAP 3602 - KAB. LEBAK 1223 - KAB. LABUHANBATU UTARA +369 more
	2	1.02.000076	Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	121.002	112	120.890	1400 - RIAU 3100 - DKI JAKARTA 2100 - KEPULAUAN RIAU 7600 - SULAWESI BARAT 7100 - SULAWESI UTARA +20 More	8102 - KAB. MALUKU TENGGARA 5202 - KAB. LOMBOK TENGAH 7172 - KOTA BITUNG 5106 - KAB. BANGLI 3517 - KAB. JOMBANG +379 more
	3	1.02.000213	Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	24	11	13	8100 - MALUKU 3300 - JAWA TENGAH 7500 - GORONTALO 9400 - PAPUA TENGAH 6400 - KALIMANTAN TIMUR +19 More	7404 - KAB. BUTON 5303 - KAB. TIMOR TENGAH UTARA 7307 - KAB. SINJAI 6204 - KAB. BARITO SELATAN 1701 - KAB. BENGKULU SELATAN +321 more
	4	1.02.000208	Rumah Sakit	Unit	5.053	1.251	3.802	5100 - BALI 5200 - NUSA TENGGARA BARAT 8200 - MALUKU UTARA 1500 - JAMBI 2100 - KEPULAUAN RIAU +22 More	6408 - KAB. KUTAI TIMUR 1171 - KOTA BANDA ACEH 1601 - KAB. OGAN KOMERING ULU 1118 - KAB. PIDIE JAYA 1704 - KAB. KAUR +362 more
	5	1.02.000209	Rumah Sakit kelas B	Unit	965	489	476	9300 - PAPUA SELATAN 3400 - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 1400 - RIAU 2100 - KEPULAUAN RIAU 8200 - MALUKU UTARA +23 More	8206 - KAB. HALMAHERA TIMUR 1105 - KAB. ACEH BARAT 9603 - KAB. RAJA AMPAT 1404 - KAB. INDRAGIRI HILIR 7571 - KOTA GORONTALO +337 more
	6	1.02.000210	Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional	Unit	982	299	683	6500 - KALIMANTAN UTARA 3400 - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2100 - KEPULAUAN RIAU 9600 - PAPUA BARAT DAYA 9200 - PAPUA BARAT +22 More	8102 - KAB. MALUKU TENGGARA 7504 - KAB. PAHUWATO 5207 - KAB. SUMBAWA BARAT 7408 - KAB. KOLAKA UTARA 3604 - KAB. SERANG +338 more
	7	1.02.000211	Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	643	236	407	3300 - JAWA TENGAH 7500 - GORONTALO 1200 - SUMATERA UTARA 7400 - SULAWESI TENGGARA +20 More	1374 - KOTA PADANG PANJANG 3371 - KOTA MAGELANG +361 more

Showing 1 to 23 of 23 entries (filtered from 6,949 total entries)



REKAP DATA SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024 DALAM DALAM SIPD



spid-ri.kemendagri.go.id/profil/dashboard-eksekutif?m=ewalidata_rekap_nasional

DASHBOARD EKSEKUTIF

- Dashboard
- RPJPD
- Arah Pembangunan
- RPJMD
- RKPD
- EWALIDATA

Tahun	No	kodeindikator	Urai	Satuan	Total	Total Provinsi	Total Kabkota	List Provinsi	List Kabkota
2024	1	1.02.000023	Dokter Spesialis Anak	Orang	9.575	3.389	6.186	8100 - MALUKU 3300 - JAWA TENGAH 3600 - BANTEN 7400 - SULAWESI TENGGARA 6100 - KALIMANTAN BARAT +25 More	1118 - KAB. PIDIE JAYA 1808 - KAB. WAY KANAN 3571 - KOTA KEDIRI 1101 - KAB. ACEH SELATAN 1105 - KAB. ACEH BARAT +396 more
	2	1.02.000022	Dokter Gigi	Orang	63.165	23.814	39.351	8100 - MALUKU 1400 - RIAU 1100 - ACEH 9500 - PAPUA PEGUNUNGAN 6400 - KALIMANTAN TIMUR +24 More	8102 - KAB. MALUKU TENGGARA 7310 - KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 3311 - KAB. SUKOHARJO 8103 - KAB. KEPULAUAN TANIMBAR 1971 - KOTA PANGKAL PINANG +401 more
	3	1.02.000024	Dokter Spesialis Anestesi	Orang	7.062	2.428	4.634	8100 - MALUKU 6400 - KALIMANTAN TIMUR 7600 - SULAWESI BARAT 3100 - DKI JAKARTA 7400 - SULAWESI TENGGARA +24 More	1175 - KOTA SUBULUSSALAM 1118 - KAB. PIDIE JAYA 5309 - KAB. NGADA 1309 - KAB. KEPULAUAN MENTAWAI 1901 - KAB. BANGKA +396 more
	4	1.02.000025	Dokter Spesialis Bedah	Orang	7.567	2.375	5.192	3300 - JAWA TENGAH 6100 - KALIMANTAN BARAT 7200 - SULAWESI TENGAH 7500 - GORONTALO 1200 - SUMATERA UTARA +25 More	5206 - KAB. BIMA 8206 - KAB. HALMAHERA TIMUR 1118 - KAB. PIDIE JAYA 3578 - KOTA SURABAYA 6301 - KAB. TANAH LAUT +397 more
	5	1.02.000027	Dokter Spesialis kebidanan	Orang	9.845	3.544	6.301	9300 - PAPUA SELATAN 3500 - JAWA TIMUR 1500 - JAMBI 1400 - RIAU 1100 - ACEH +25 More	1118 - KAB. PIDIE JAYA 7211 - KAB. BANGGAI LAUT 1601 - KAB. OGAN KOMERING ULU 3329 - KAB. BREBES 3505 - KAB. BLITAR +394 more
	6	1.02.000029	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Orang	3.837	1.418	2.419	5200 - NUSA TENGGARA BARAT 9400 - PAPUA TENGAH 3500 - JAWA TIMUR 1500 - JAMBI 1400 - RIAU +24 More	1601 - KAB. OGAN KOMERING ULU 5314 - KAB. ROTE NDAO 1118 - KAB. PIDIE JAYA 1377 - KOTA PARIAMAN 7212 - KAB. MOROWALI UTARA +382 more
	7	1.02.000032	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang	10.912	3.677	7.235	3100 - DKI JAKARTA 3500 - JAWA TIMUR 3200 - JAWA BARAT 7200 - SULAWESI TENGAH 3300 - JAWA TENGAH +25 More	6301 - KAB. TANAH LAUT 5314 - KAB. ROTE NDAO 1175 - KOTA SUBULUSSALAM 5204 - KAB. SUMBAWA 1105 - KAB. ACEH BARAT +395 more
	8	1.02.000034	Dokter Spesialis THT	Orang	4.364	1.379	2.985	3300 - JAWA TENGAH 7400 - SULAWESI TENGGARA	1372 - KOTA SOLOK 9303 - KAB. MAPPI

Showing 1 to 19 of 19 entries (filtered from 6,949 total entries)



REKAP DATA SEKTORAL DAERAH TAHUN 2024 DALAM DALAM SIPD



sipd-ri.kemendagri.go.id/profil/dashboard-eksekutif?m=ewalidata_rekap_nasional

DASHBOARD EKSEKUTIF

- Dashboard
- RPJPD
- Arah Pembangunan
- RPJMD
- RKPD
- EWALIDATA

Tahun

2024

Tematik

Semua Tematik

No	kodeindikator ↑↓	Urai ↑↓	Satuan ↑↓	Total ↑↓	Total Provinsi ↑↓	Total Kabkota ↑↓	List Provinsi ↑↓	List Kabkota ↑↓
1	3.25.000207	pupuk ikan	Paket	281.621	0	281.621		3275 - KOTA BEKASI 6305 - KAB. TAPIN 5105 - KAB. KLUNGKUNG 3404 - KAB. SLEMAN 1114 - KAB. ACEH JAYA +302 more
2	3.27.000476	Jumlah penggunaan pupuk	Ton	305.764.242	129.767.886	175.996.356	3600 - BANTEN 1900 - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 8100 - MALUKU 6200 - KALIMANTAN TENGAH 9600 - PAPUA BARAT DAYA +17 More	9503 - KAB. YAHUKIMO 9203 - KAB. FAK FAK 3309 - KAB. BOYOLALI 3506 - KAB. KEDIRI 5310 - KAB. MANGGARAI +323 more
3	3.27.000399	Jumlah ketersediaan pupuk	Ton	2.220.745.250	16.146.752	2.204.598.498	7400 - SULAWESI TENGGARA 3300 - JAWA TENGAH 1100 - ACEH 1400 - RIAU 7300 - SULAWESI SELATAN +19 More	1108 - KAB. ACEH UTARA 1613 - KAB. MUSI RAWAS UTARA 3510 - KAB. BANYUWANGI 3574 - KOTA PROBOLINGGO 1106 - KAB. ACEH BESAR +283 more
4	3.25.000364	Pupuk pembudidayaan ikan di Air Payau dan Air Tawar	Ton	15.913.203	15.913.203	0	1200 - SUMATERA UTARA 7400 - SULAWESI TENGGARA 7200 - SULAWESI TENGAH 3500 - JAWA TIMUR 1900 - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG +14 More	
5	3.27.000585	Jumlah Sebaran pupuk	Ton	273.254.912	145.047.869	128.207.043	3500 - JAWA TIMUR 9100 - PAPUA 1400 - RIAU 3600 - BANTEN 6300 - KALIMANTAN SELATAN +17 More	9503 - KAB. YAHUKIMO 6502 - KAB. MALINAU 1118 - KAB. PIDIE JAYA 3505 - KAB. BLITAR 3327 - KAB. PEMALANG +269 more
6	3.27.000651	Jumlah Pupuk baik pupuk subsidi dan pupuk non subsidi yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan pada lahan garapannya.	Ton	124.507.151	124.507.151	0	5100 - BALI 9600 - PAPUA BARAT DAYA 1100 - ACEH 9100 - PAPUA 1300 - SUMATERA BARAT +9 More	
7	3.30.000056	Pelaksanaan Koordinasi dan	Kegiatan	42	42	0	1400 - RIAU 6100 - KALIMANTAN BARAT	

Showing 1 to 11 of 11 entries (filtered from 6.949 total entries)



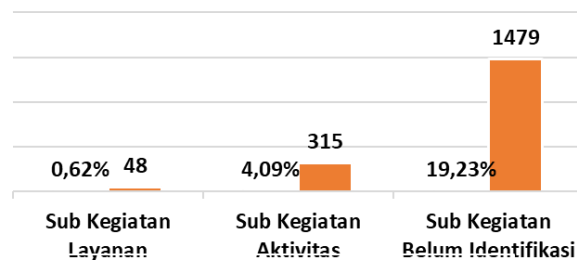
TERDAPAT SUB KEGIATAN YANG TIDAK DIGUNAKAN PEMDA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

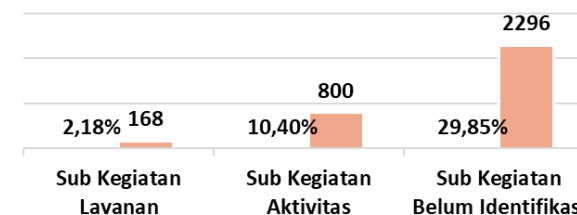


**Grafik Penggunaan
Sub Kegiatan Provinsi**



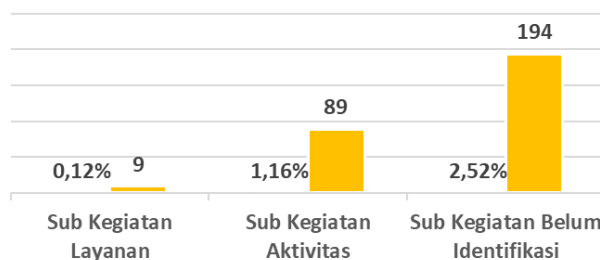
Provinsi
Total Sub Kegiatan yang digunakan 5851 (76,06%)
Total Sub Kegiatan yang tidak digunakan 1842 (23,94%)
Total Sub Kegiatan 7693

**Grafik Penggunaan
Sub Kegiatan Provinsi
(digunakan oleh ≤ 10 Provinsi)**



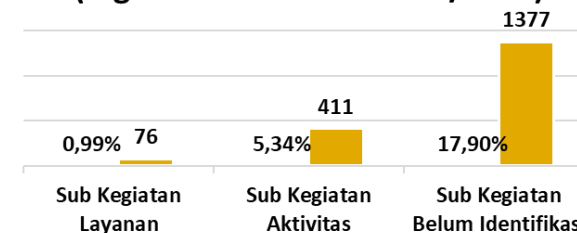
Provinsi
Total Sub Kegiatan yang digunakan 4429 (57,57%)
Total Sub Kegiatan yang tidak digunakan 3264 (42,43%)
Total Sub Kegiatan 7693

**Grafik Penggunaan
Sub Kegiatan Kabupaten/Kota**



Kabupaten/Kota
Total Sub Kegiatan yang digunakan 7401 (96,2%)
Total Sub Kegiatan yang tidak digunakan 292 (3,8%)
Total Sub Kegiatan 7693

**Grafik Penggunaan
Sub Kegiatan Kabupaten/Kota
(digunakan oleh ≤ 10 Kab/Kota)**



Kabupaten/Kota
Total Sub Kegiatan yang digunakan 5829 (75,77%)
Total Sub Kegiatan yang tidak digunakan 1864 (24,23%)
Total Sub Kegiatan 7693



ARAHAN DAN TINDAK LANJUT



- ✓ Memastikan program prioritas Pemerintah Daerah selain mendukung visi misi Kepala Daerah juga **selaras** dengan Prioritas dan Program Strategis Nasional yang tertuang dalam **Asta cita dan Pelayanan Publik sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 10 tahun 2025 dan per UU lainnya.**
- ✓ Memastikan muatan penyelarasan pada RPJPN dengan RPJPD **dituangkan** dalam penyelarasan tema RKP 2026 terhadap **RKPD Tahun 2026** serta **mengacu** pada rancangan **RPJMD Tahun 2025-2029.**
- ✓ Mengusung pemanfaatan **Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang ditetapkan setiap tahun oleh kepala daerah** dalam penyusunan dokumen perencanaan sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.





Kementrian Dalam Negeri
Republik Indonesia

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



TERIMA KASIH

